



## MERAUKE “*FOOD ESTATE*”: ALTERNATIF PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI-SOSIAL DAN BUDAYA

Binsar Sianipar<sup>1</sup>, Amanah Nurish<sup>2</sup>

Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia, Indonesia:

<sup>1</sup>[binsar.sianipar@ui.ac.id](mailto:binsar.sianipar@ui.ac.id); <sup>2</sup>[amanah11@ui.ac.id](mailto:amanah11@ui.ac.id)

### *Abstract*

*This study analyzes food estate in Merauke as a conflict resolution alternative in Papua from economic-social and cultural perspectives. The conflicts in Papua are still happening and no best solution has been found yet. Among the roots of the problem are economic and social disparities as well as cultural disharmony. The government is planning to develop a food estate in Merauke, Papua to enhance national food security and as export commodities. Apart from the Government's objectives, the analysis used qualitative research methods with a sociological approach through field observation and participation. Adopting Galtung's theory of violence, it shows the food estate in Merauke can potentially contribute to resolving conflicts in Papua, especially to eliminate direct violence and structural violence.*

**Keywords:** *conflict, food estate, Papua, violence*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisa *food estate* di Merauke sebagai alternatif penanganan konflik di Papua dari perspektif ekonomi-sosial dan budaya. Persoalan konflik di Papua masih terus terjadi dan sejauh ini belum ditemukan solusi terbaik. Akar utama masalah ini diantaranya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial serta disharmoni budaya. Saat ini Pemerintah berencana membangun *food estate* di Merauke, Papua untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional serta sebagai komoditas ekspor. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui observasi dan partisipasi lapangan. Dengan mengadopsi teori kekerasan dari Galtung penelitian ini menunjukkan bahwa program *food estate* di Merauke dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Papua, terutama untuk mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

**Kata kunci:** *food estate, kekerasan, konflik, Papua*

## Pendahuluan

Sampai saat ini permasalahan konflik di Papua masih menjadi isu menonjol dan belum ditemukan cara penyelesaian terbaik. Kondisi tersebut ditengarai merupakan akibat dari kompleksitas persoalan yang terjadi. Berbagai penelitian empiris yang telah dilaksanakan, baik oleh para akademisi, lembaga pemerintah maupun swasta dari dalam dan luar negeri, menyimpulkan bahwa persoalan konflik di Provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat (selanjutnya di sebut Papua), merupakan konflik multidimensi. Artinya konflik yang terjadi berakar dari berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Hasil penelitian (Widjojo et al., 2010) misalnya menyebutkan bahwa setidaknya ada empat sumber persoalan mendasar penyebab konflik di Papua. Pertama, terjadinya marjinalisasi masyarakat asli Papua sebagai akibat dari konflik politik, pembangunan ekonomi yang tidak merata, serta masuknya masyarakat dari luar secara besar – besaran ke Papua sejak tahun 1970an. Kedua, Pemerintah belum berhasil dalam pembangunan bidang sosial, terutama pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi di Papua, baik masyarakat asli Papua maupun wilayah Papua secara keseluruhan. Ketiga, perbedaan konstruksi menyangkut sejarah dan identitas politik yang dipahami oleh masyarakat asli Papua dan para elit Pemerintah di Jakarta. Keempat, residu peristiwa kekerasan yang menimpa warga masyarakat Papua dimasa lalu sebagai dampak ikutan penanganan masalah keamanan di wilayah tersebut oleh aparat negara. Sejumlah penelitian lain juga menemukan bahwa sumber persoalan konflik di Papua sangat kompleks dan multidimensional (Anderson, 2015; Chauvel & Bhakti, 2004; Fernandes, 2006; McGibbon, 2004a; Mollet, 2007; Sumule, 2004)

Terkait dengan permasalahan di sektor ekonomi dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Papua, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana untuk membangun *food estate* di Merauke (Noviani, 2015). Program ini sebenarnya bukan hal yang baru. sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemerintah juga telah mencanangkan program serupa dengan nama Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Program *food estate* di Merauke merupakan salah satu program strategis dalam Pemerintahan SBY dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pada tahun 2010 (Ginting & Pye, 2013, p. 160). Namun program tersebut kurang berhasil dan tidak berlanjut karena sejumlah persoalan (Santosa, 2014). Presiden Joko Widodo berencana membangun kembali *food estate* di Merauke setelah sebelumnya telah berhasil membangun program serupa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara (Basundoro & Sulaeman, 2020). Tujuan utama dari

program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan menjadikan daerah-daerah *food estate* sebagai lumbung pangan nasional untuk komoditas tertentu sesuai dengan tanaman pangan yang cocok.

Meskipun tujuan pembangunan *food estate* terutama untuk meningkatkan produksi bahan pangan, baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat di daerah lain di Indonesia, namun keberadaan *food estate* tersebut diyakini akan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berangkat dari isu tersebut penulis menganalisa program *food estate* di salah satu provinsi di Papua, yaitu di Merauke, dikaitkan dengan penyelesaian masalah konflik di Papua dari perspektif ekonomi-sosial dan budaya. Salah satu sumber konflik di Papua adalah masalah kesenjangan ekonomi, sosial dan tingkat kesejahteraan sehingga apabila persoalan tersebut dapat diatasi dengan keberadaan *food estate* maka konflik yang selama ini terjadi di Papua akan berangsur selesai pula. Hal tersebut mengingat *food estate* di Merauke memiliki potensi bukan saja untuk menyediakan bahan pangan guna memperkuat persediaan pangan nasional namun juga berdampak pada pergerakan ekonomi-sosial serta budaya masyarakat di Merauke khususnya dan Papua pada umumnya.

Keberadaan *food estate* di Merauke, apabila berhasil, memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pergerakan serta peningkatan aktivitas ekonomi yang baik diharapkan berkontribusi positif terhadap penambahan jumlah lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penulis meyakini bahwa analisa mengenai program *food estate* di Merauke memiliki kaitan dan relevansi dengan penyelesaian konflik di Papua dan bahkan memberikan perspektif serta alternatif yang baru untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pembahasan dengan menggunakan teori tentang kekerasan dan konflik dari Galtung sebagai lensa analisa, khususnya mengenai kekerasan langsung (*direct violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*) (Galtung, 1969, 1990; Galtung & Höivik, 1971). Kedua aspek tersebut digunakan untuk memetakan konflik yang terjadi dalam masyarakat Papua secara umum dan kemudian dikaitkan dengan potensi penyelesaiannya melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi-sosial dan budaya sebagai hasil dari program *food estate* di Merauke.

## Konflik dan Kekerasan di Papua Berdasarkan Perspektif Galtung

Landasan teoritis artikel ini adalah menggunakan teori kekerasan (*violence*) dari Johan Galtung. Menurut Galtung kekerasan hadir ketika manusia sedang dalam pengaruh, sehingga realisasi somatik dan mental yang sebenarnya berada di bawah potensi realisasi dirinya. Menurut dia ada hubungan erat antara kekerasan, perdamaian (*peace*) dan konflik (*conflict*). Perdamaian merupakan suatu kondisi yang tercipta ketika tidak ada kekerasan. Sedangkan kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan. Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi tiga yaitu kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*) dan kekerasan kultural (*cultural violence*) (Galtung, 1969, 1990; Galtung & Høivik, 1971). Namun dalam artikel ini penulis hanya menggunakan dua tipologi kekerasan tersebut yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural sebagai landasan teori agar pembahasan bisa lebih fokus dan mendalam.

Berdasarkan uraian beberapa tulisan Galtung secara umum kekerasan dapat digambarkan sebagai setiap kondisi fisik atau psikologis, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dilakukan oleh pelaku secara langsung atau tidak langsung, secara verbal atau fisik, yang kelihatan (*manifest*) atau tidak kelihatan (*latent*), yang bersifat melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri sendiri atau pihak lain. Sedangkan kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang kelihatan nyata atau individu tertentu sehingga disebut juga sebagai *personal violence*. Sementara itu, kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pelakunya bersifat tidak kelihatan atau *latent*. Salah satu contohnya adalah ketidakadilan (*injustice*) (Galtung, 1969, 1971, 1990, 2007).

Dalam konteks konflik di Papua, kekerasan langsung misalnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang kelihatan (*manifest*) seperti oknum aparat keamanan terhadap anggota Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau sebaliknya, kekerasan antar warga masyarakat karena tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) dan akibat perang antar suku. Sementara itu, kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi namun pelakunya tidak kelihatan (*latent*), yaitu ketidakadilan (*injustice*) khususnya kesenjangan ekonomi-sosial yang dialami oleh masyarakat Papua, terutama masyarakat asli, dibandingkan dengan masyarakat lain di wilayah tengah dan barat Indonesia.

Aspek lain dari teori Galtung tentang kekerasan dan konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan menyeluruh (*holistic approach*), bukan saja melalui pendekatan keamanan (*security approach*).

Selama ini penyelesaian konflik umumnya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Kondisi ini tercermin misalnya dari penanganan konflik internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi bangsa-bangsa terbesar di dunia ini memiliki organ yang memiliki fokus pada penanganan konflik yaitu *UN Security Council*. Penggunaan istilah *security* (keamanan) pada organ PBB secara eksplisit menegaskan bahwa pendekatan keamanan merupakan aspek utama yang dikedepankan dalam penanganan konflik. Dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan ini secara langsung atau tidak langsung ada pihak yang dianggap sebagai ancaman atau penimbul konflik yang harus dilenyapkan agar tercipta perdamaian. Oleh karena itu upaya penyelesaian konflik yang dilakukan biasanya adalah dengan mengirimkan aparat keamanan untuk menindak pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman atau penyebab konflik (Galtung, 2007).

Galtung berpendapat bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan keamanan saja tidak cukup. Perlu disertai dengan pendekatan lain. Terkait hal ini dia menawarkan sebuah pendekatan baru dalam penyelesaian konflik, yaitu perbaikan hubungan antara pihak yang terlibat konflik. Aspek yang menjadi fokus adalah penyelarasan tujuan yang bersesuaian atau cocok (*compatible*) dari mereka yang terlibat konflik. Menurutnya, para pihak tersebut terlibat dalam konflik karena mereka memiliki perbedaan agenda atau tujuan. Semakin besar perbedaan tujuan mereka maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Mengingat penyebab konflik tersebut maka penyelesaian yang paling tepat adalah dengan menciptakan tujuan yang bersesuaian antara para pihak yang berkonflik. Namun dia juga menekankan arti penting upaya penyelesaian sebuah konflik secara menyeluruh sehingga pendekatan keamanan seyogyanya tetap dilakukan apabila masih diperlukan (Galtung, 2007). Oleh karena itu, analisis mengenai pengembangan *Food Estate* di Merauke diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam penanganan konflik di Papua sehingga dapat mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang terjadi di wilayah tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis melalui observasi dan partisipasi lapangan sekaligus berdasarkan hasil penelitian empiris mengenai pengaruh kondisi ekonomi-sosial terhadap stabilitas politik dan keamanan serta timbulnya konflik di masyarakat Papua. Penulis melakukan kegiatan observasi dan partisipasi di lapangan selama sekitar dua tahun berdinam di Papua yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut penulis mengamati dan berinteraksi secara

langsung dengan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan, upacara adat, rapat dengan Pemda setempat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari berbagai kegiatan tersebut penulis mendapatkan data tentang pokok-pokok pikiran atau pandangan dari berbagai elemen masyarakat Papua terutama berbagai isu terkait konflik di Papua. Elemen masyarakat Papua yang terlibat kegiatan tersebut meliputi pejabat dan aparat Pemda Papua, anggota DPRD, aparat keamanan, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan warga asli Papua, serta warga pendatang. Penulis menggunakan hasil observasi dan interaksi tersebut sebagai data primer dalam penelitian ini.

Untuk melengkapi data primer tersebut penulis juga menggunakan data sekunder yang relevan yaitu laporan resmi instansi Kementerian / Lembaga Pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Selain itu, sejumlah artikel jurnal penelitian, baik domestik maupun internasional, yang terkait dengan ketahanan pangan, konflik, dan kekerasan juga menjadi bahan rujukan dalam pembahasan. Seluruh data tersebut, baik primer, sekunder serta data lain yang relevan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori kekerasan (*violence*) dari Galtung guna membahas potensi program *food estate* di Merauke sebagai sebuah alternatif dalam penyelesaian konflik di Papua, terutama untuk mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

### **Merauke *Food Estate* dan Pendekatan Non-Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Papua: Sebuah Alternatif Baru?**

Program *food estate* di Merauke memiliki tujuan utama untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan nasional serta menghasilkan komoditas untuk keperluan ekspor (Noviani, 2015; Santosa, 2014). Namun penelitian ini mencoba untuk menganalisis program tersebut dari perspektif yang berbeda, yaitu untuk penyelesaian konflik di Papua, khususnya sebagai sebuah alternatif baru bagi penyelesaian konflik melalui pendekatan non-keamanan. Perspektif yang berbeda dalam analisa tersebut diambil dengan dilandasi dua pertimbangan. Pertama, konflik di Papua memiliki akar permasalahan yang kompleks yang bersumber dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun selama ini pendekatan yang diambil pemerintah yang dominan adalah pendekatan keamanan (Anderson, 2015; Chauvel & Bhakti, 2004; Druce, 2020). Pendekatan lain melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diimplementasikan melalui penyaluran Dana Otonomi Khusus memang telah dilaksanakan tetapi dinilai kurang berhasil (Bertrand, 2014; McGibbon, 2004b; Tryatmoko, 2016).

Kedua, meskipun tujuan utama program *food estate* di Merauke adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yaitu sebagai penyumbang stok pangan nasional serta menghasilkan komoditas untuk keperluan ekspor, program ini secara simultan juga dapat juga digunakan sebagai pendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua. Mengingat kesenjangan ekonomi-sosial dan disharmoni budaya merupakan sumber konflik di wilayah Papua maka dengan tidak mengesampingkan tujuan utamanya, program *food estate* dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

Sebelum membahas mengenai bagaimana program *food estate* di Merauke dapat menjadi sebuah alternatif untuk penyelesaian masalah konflik, terlebih dahulu akan diuraikan tentang potensi dan kelayakan pengembangan *food estate* di Merauke serta kontribusinya terhadap peningkatan kondisi ekonomi-sosial dan harmoni budaya masyarakat Merauke, khususnya penyelesaian konflik melalui eliminasi kekerasan.

### **Potensi dan Kelayakan Pengembangan *Food Estate* di Merauke**

Program *food estate* di Merauke bukanlah hal yang baru. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemkab Merauke mengusulkan program serupa yang bernama *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) yang dicanangkan pada tahun 2007. Pemerintah pusat kemudian mengadopsi usulan tersebut menjadi program nasional dengan nama *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) pada tahun 2010. Program nasional tersebut diluncurkan karena Merauke memiliki lahan yang luas dan subur yang cocok untuk pengembangan daerah pertanian. Pada saat itu Pemda Merauke mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektar dari total 2,4 juta hektar lahan yang masih bisa dikembangkan. Selain itu, Merauke juga memiliki sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung program tersebut. Terdapat 60 lokasi transmigrasi yang tersebar di wilayah Merauke yang mampu menyediakan tenaga kerja dibidang pertanian. Adapun komoditas pangan yang direncanakan untuk dikembangkan antara lain adalah padi, jagung, kedelai, tebu, dan sapi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, komoditas tersebut memiliki hasil yang baik. Produktifitas padi yang ditanam dapat mencapai 7 ton/ha Gabah Kering Panen (GKP), kedelai 2 ton/ha, tebu 40 ton/ha dan jagung 5 ton/ha pipilan kering. Guna melaksanakan program tersebut Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 60 triliun yang akan dikeluarkan sampai tahun 2014. Diproyeksikan MIFEE akan menghasilkan 2 juta ton beras dan jagung, 0,2 juta ton kedelai, 2,5 juta ton gula, 1 juta ton CPO dan 64 ribut ton daging sapi per tahun. Diharapkan hasil produksi bahan pangan dari program tersebut akan berkontribusi secara signifikan

terhadap cadangan pangan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun program tersebut mengalami sejumlah hambatan yang bersumber dari investor, pemerintah, dan masyarakat. Hanya sebagian kecil dari investor yang telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan dari Pemerintah, yaitu 14 dari 36 calon investor. Hal ini terjadi karena masalah birokrasi perijinan yang panjang dan rumit. Dari jumlah tersebut hanya 10 investor yang telah memulai aktivitas. Sementara itu, hambatan dari masyarakat adalah terkait keberatan mereka atas pengambilan lahan milik masyarakat adat oleh investor swasta, terutama swasta asing. Infrastruktur juga menjadi faktor penghambat, terutama kekurangan sarana jalan, jembatan, dan pelabuhan (Santosa, 2014).

Berdasarkan analisa dari program sebelumnya tersebut, dapat dikatakan bahwa proyeksi tingkat keberhasilan pengembangan *food estate* di Merauke sebenarnya sangat besar. Apalagi saat ini infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sudah tersedia cukup baik berkat pembangunan jalan Trans Papua dari Sorong, Provinsi Papua Barat sampai ke Merauke, Provinsi Papua. Pemerintah telah cukup berhasil membangun infrastruktur jalan di Papua, yaitu jalan Trans Papua sepanjang 4.158 km sejak masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie sampai tahun 2019 di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Target yang akan dibangun adalah sepanjang 4.329 km (Kirksey & Bilsen, 2002; Rizal dkk., 2019).

Pembangunan jalan Trans Papua merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan biaya logistik serta mendorong perekonomian di wilayah sepanjang koridor jalan utama tersebut. Penurunan biaya logistik akan menurunkan harga barang – barang dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Terlaksananya pembangunan jalan Trans Papua diharapkan akan menghubungkan daerah yang selama ini terisolasi agar terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, jalan Trans Papua tersebut secara langsung memberikan solusi atas masalah infrastruktur jalan yang dulu menjadi kendala pada pengembangan *food estate* sebelumnya.

### **Kontribusi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Papua**

Keberhasilan pengembangan *food estate* di Merauke diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Papua, seperti penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan pangan, penggerak roda perekonomian, dan peningkatan pendapatan. Program *food estate* akan membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, baik *on farm* maupun *off farm*. Kegiatan *on farm* yaitu aktivitas yang terkait langsung dengan proses pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, sampai proses panen. Dengan luas lahan yang

dialokasikan untuk *food estate* yang mencapai 1,2 juta hektar tentu akan menyediakan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Merauke dan sekitarnya.

Selain itu, kegiatan *off farm*, yaitu kegiatan pasca panen seperti kegiatan menyimpan, mengolah, memperpanjang masa pakai hasil panen, serta peningkatan nilai tambahnya juga menyediakan lapangan kerja yang besar pula. Ketersediaan lapangan kerja yang besar tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat Merauke dan sekitarnya pada khususnya dan Papua pada umumnya. Mereka akan mendapatkan pekerjaan dan sumber pendapatan sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program *food estate* juga akan menyediakan bahan pangan yang melimpah dan cukup terjangkau bagi masyarakat Merauke pada khususnya serta Papua pada umumnya. *Food estate* di Merauke akan mendekatkan titik produksi bahan pangan sehingga mampu menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau. Selama ini sebagian besar bahan pangan perlu didatangkan dari luar daerah dan harganya cukup mahal akibat biaya logistik yang tinggi di Papua. Akibatnya masyarakat Papua harus menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan bahan pangan. Dengan adanya *food estate* harga komoditas pangan diharapkan akan turun karena rantai distribusi yang tidak terlalu panjang. Keberhasilan pengembangan *food estate* di Merauke akan menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan, dan murah. Jika program *food estate* kali ini berhasil, maka program serupa bisa diadopsi di daerah lain di Provinsi Papua, sehingga ke depan tercipta hub-hub pangan regional yang akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kontribusi lain dari *food estate* di Merauke ini adalah sebagai penggerak kegiatan perekonomian di daerah setempat. Kegiatan pertanian dengan skala besar tersebut tentu memerlukan sarana dan prasarana produksi yang besar sehingga pasti akan menghidupkan sektor perdagangan terutama benih, pupuk, mesin pertanian dan lain-lain.

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang cukup besar yang diserap oleh *food estate* juga memerlukan sarana pendukung kehidupan sehari – hari seperti fasilitas perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya akan terjadi peningkatan pertumbuhan permintaan perumahan, fasilitas kesehatan / rumah sakit, dan sarana pendidikan / sekolah bagi keluarga para pekerja. Kesemuanya itu akan membuat ekonomi bergerak dan tumbuh. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan meningkatkan kondisi ekonomi-sosial masyarakat Papua agar setara dengan masyarakat lain di bagian tengah dan barat Indonesia. Selanjutnya kesetaraan kondisi ekonomi-sosial tersebut secara perlahan–lahan diharapkan akan berkontribusi untuk menghilangkan konflik yang telah terjadi bertahun-tahun.

Kesenjangan sosial dan ekonomi memiliki peran dan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya konflik. Situasi tersebut bukan hanya spesifik terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain di dunia. Sebuah studi kasus yang dilakukan di Britania dan Skotlandia menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara daerah menjadi salah satu benih konflik, bahkan berujung separatisme. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa konflik ekonomi antar daerah, seperti tentang redistribusi fiskal antar daerah akan dengan mudah muncul antar daerah pada tingkat pembangunan yang berbeda, dan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama saat resesi yang berkepanjangan, konflik tersebut dapat menjadi benih munculnya gerakan separatis. Hal ini bisa terjadi baik di daerah yang miskin maupun kaya. Tesis tersebut lebih lanjut berpendapat bahwa seluruh proses ini hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita menganalisis masyarakat melalui lensa kelas ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Mengingat ketimpangan pembangunan daerah seringkali menjadi akar dari konflik ekonomi antar daerah, maka salah satu cara untuk menghindari konflik tersebut - dan juga separatisme - adalah dengan menyamakan tingkat pembangunan di semua daerah (Rajic, 2017). Merujuk pada hal tersebut maka terkait persoalan di Papua, salah satu cara untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan menyamakan tingkat pembangunan di Papua dengan semua daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini pembangunan *food estate* di Merauke menjadi sebuah alternatif baru untuk penyelesaian konflik di Papua tersebut.

### ***Food Estate* Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik di Papua**

Salah satu akar permasalahan konflik di Papua adalah kesenjangan ekonomi-sosial antara masyarakat Papua dengan masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah serta kondisi disharmoni dalam masyarakat Papua, baik antar warga maupun antara masyarakat asli Papua dengan pendatang. Kesenjangan keadaan ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat Papua bertolak belakang dengan kekayaan alam yang tersedia di wilayah tersebut. Tanah Papua memiliki berbagai sumber daya alam seperti bahan tambang yang bernilai tinggi dalam hal ini minyak bumi, gas alam, emas, tembaga dan bahkan uranium. Wilayah Papua juga sangat luas dan subur serta memiliki keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Namun sumber daya alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, perak, dan uranium, ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Padahal mereka sudah dieksploitasi selama puluhan tahun oleh perusahaan multinasional. Masyarakat Papua menganggap bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi adalah milik masyarakat adat, tetapi yang diuntungkan selama ini justru dikuasai

oleh pihak lain, masyarakat non-Papua, seperti perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di sana. Sementara pemilik tanah adat dibiarkan dalam kemiskinan dan terusir dari tanah mereka tanpa kompensasi. Keberadaan para transmigran serta pendatang mandiri ke Papua juga menyebabkan masyarakat asli Papua menjadi semakin terpinggirkan. Sebaliknya masyarakat non-Papua juga menjadi semakin dominan dalam kegiatan ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari di tanah Papua (Druce, 2020).

Dominasi dalam kehidupan ekonomi juga membuat masyarakat pendatang memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Disparitas ekonomi dan sosial ini diyakini menjadi faktor penting yang memicu kecemburuan sosial sebagian masyarakat asli Papua dengan kaum pendatang. Situasi tersebut juga menimbulkan rasa kecewa terhadap Pemerintah pusat yang dianggap tidak mampu membangun Papua seperti daerah atau propinsi lain di Kawasan tengah dan barat Indonesia sehingga mereka jauh tertinggal. Pada akhirnya kecemburuan dan kekecewaan tersebut menimbulkan konflik, baik konflik horizontal antara masyarakat asli Papua dengan para pendatang. Sementara konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat adat Papua dengan Pemerintah pusat di Jakarta. Situasi tersebut turut menyemai dan menyuburkan benih-benih separatisme di tanah Papua yang telah ada pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962. Pepera (*Act of Free Choice*) adalah referendum yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia (Viartasiwi, 2018).

Aspek keragaman etnis dan keagamaan juga dinilai turut berkontribusi terhadap konflik di Papua. Secara umum bentrokan fisik atau bersenjata di Papua terjadi antara pendukung gerakan pro-kemerdekaan dengan aparat keamanan kerap terjadi. Di sisi lain konflik antar umat beragama, terutama kaum pendatang yang mayoritas Muslim dan penduduk asli Papua yang mayoritas Kristen juga bisa terjadi bila tak ditangani secara efektif. Misalnya pada tahun 2007 terjadi ketegangan antara kedua kelompok tersebut di Manokwari dan Kaimana di propinsi Papua Barat. Memang akhirnya bentrokan dapat dihindarkan namun tetap saja ketegangan itu menyisakan perasaan sakit hati di kedua belah pihak. Sebenarnya penyebab utamanya bukanlah perbedaan keyakinan diantara mereka. Perpindahan penduduk dari daerah lain di Indonesia ke Papua yang terus berlangsung yang mayoritas beragama Islam yang telah membuat kecemburuan penduduk asli yang merasa mulai terancam. Hal ini karena para pendatang memiliki kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Selain itu munculnya kelompok-kelompok baru yang bersifat eksklusif di masyarakat, baik di kalangan umat Islam maupun

Kristen di Papua telah memperkuat persepsi bahwa agama yang lain adalah musuh. Kondisi ini salah satunya merupakan dampak yang tidak hilang dari konflik Maluku serta pengaruh dari perkembangan di luar Papua (International Crisis Group, 2008).

Uraian tersebut secara jelas menggambarkan sejumlah akibat dari konflik di Papua yang bermanifestasi dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Bentuk kekerasan langsung yang cukup sering terjadi adalah pertikaian antara warga masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang, perang antar suku, dan pertikaian bersenjata antara aparat keamanan dengan KKSBB. Peristiwa-peristiwa kekerasan langsung tersebut telah membawa penderitaan kepada masyarakat setempat maupun aparat keamanan, baik secara fisik atau psikologis. Secara fisik, berbagai peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan rumah penduduk, bangunan sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Secara psikologis, masyarakat mengalami trauma yang mendalam atas berbagai peristiwa kekerasan tersebut. Bukan saja mereka yang mengalami langsung peristiwa kekerasan namun juga masyarakat di Papua secara umum yang mendengar atau melihatnya melalui media. Ada perasaan takut dan terancam yang menyebar di tengah masyarakat Papua sehingga secara kolektif mengganggu kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun bentuk kekerasan struktural yang dialami masyarakat Papua berupa ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, sampai saat ini sebagian besar masyarakat asli Papua belum dapat menikmati taraf kehidupan yang cukup baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang cukup seperti yang telah dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia di wilayah bagian tengah dan barat. Di bidang sosial, sebagian besar masyarakat Papua juga belum dapat menikmati pelayanan kesehatan dan pendidikan yang cukup baik seperti saudara-saudara mereka di wilayah bagian tengah dan barat Indonesia. Selain itu, disharmoni budaya berupa benturan budaya antara masyarakat asli Papua dengan pendatang turut mengganggu ketenteraman dan kehidupan sosial masyarakat.

Penyebab terjadinya ketidakadilan tersebut tentu tidak dapat ditudingkan kepada satu pihak tertentu saja. Galtung mengategorikan kondisi seperti ini sebagai kekerasan struktural. Banyak aktor dan faktor yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, dan sengaja atau tidak sengaja. Pemerintah mungkin turut andil. Masyarakat, baik pendatang maupun masyarakat asli Papua juga mungkin turut andil. Aspek kebudayaan, adat istiadat dan kehidupan keagamaan pun mungkin juga turut andil dalam menimbulkan kekerasan struktural tersebut. Terkait hal tersebut, program *food estate* di Merauke diyakini dapat menjadi sebuah alternatif penyelesaian konflik melalui eliminasi terhadap kekerasan langsung dan kekerasan struktural tersebut.

## Eliminasi Kekerasan Langsung

Dampak dari konflik di Papua yang sering dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat disana, baik orang asli Papua maupun masyarakat pendatang, terjadinya berbagai peristiwa kekerasan langsung. Peristiwa kekerasan langsung yang cukup sering terjadi antara lain berupa pertikaian antara warga, yaitu antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang, perang antar suku, serta pertikaian bersenjata antara aparat keamanan dengan KKSB.

Menurut Galtung kekerasan hadir ketika seseorang sedang dalam pengaruh sehingga realisasi somatis dan mental pada diri orang tersebut tidak maksimal namun berada pada tingkatan yang lebih rendah atau di bawah potensi sebenarnya yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara kekerasan, perdamaian (*peace*) dan konflik (*conflict*). Perdamaian merupakan suatu kondisi yang tercipta ketika tidak ada kekerasan. Sedangkan kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan.

Pandangan Galtung yang menyatakan bahwa kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan memiliki relevansi dengan kekerasan langsung yang terjadi di Papua, baik antara orang asli Papua dengan pendatang, antar suku dari orang asli Papua sendiri maupun antara KKSB dan aparat keamanan. Keteringgalan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, dalam berbagai aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, politik dan budaya telah menimbulkan kesengsaraan baik berupa kemiskinan maupun keterpinggiran. Ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa banyak warga pendatang atau orang yang bukan asli Papua ternyata memiliki kehidupan sosial dan ekonomi lebih baik maka munculnya rasa kecewa dan kecemburuan sosial dari orang asli Papua tentu wajar. Perasaan tersebut juga wajar ketika mereka melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia di luar Papua secara umum jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di Papua.

Perasaan kecewa dan kecemburuan tersebut mungkin tidak akan berbahaya bila hanya dialami oleh satu atau dua orang serta di alami dalam waktu tidak lama. Mungkin satu atau dua orang tersebut akan mampu menahan diri untuk tidak melampiaskan rasa kecewa dan kecemburuan tadi dalam tindakan fisik misalnya melakukan tindak kekerasan terhadap pihak yang menjadi obyek kekecewaan atau kecemburuan tersebut. Pun bila rasa kecewa dan kecemburuan dari satu atau dua orang tersebut meledak dan bermanifestasi dalam bentuk kekerasan, misalnya menyerang orang lain, mungkin masih relatif mudah dikendalikan. Namun bila perasaan negatif tersebut dialami banyak orang dan dalam jangka panjang, yaitu seperti

yang dialami oleh sebagian besar orang asli Papua selama puluhan tahun, maka munculnya berbagai tindak kekerasan adalah sebuah keniscayaan. Susah untuk dicegah.

Akibatnya secara sporadis bentuk-bentuk kekerasan langsung semacam itu telah terjadi selama puluhan tahun. Kekerasan langsung tersebut akan terus terjadi bila salah satu akar masalahnya yaitu ketertinggalan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya tidak diselesaikan. Penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah saat ini melalui pendekatan keamanan memang penting dan harus terus dilakukan agar masyarakat merasa aman. Namun penanganan dengan pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, termasuk kekerasan langsung yang terus terjadi.

Agar dampak konflik berupa kekerasan langsung dapat dicegah maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikan akar masalah diantaranya yaitu kesenjangan ekonomi, sosial, dan disharmoni budaya yang dialami orang asli Papua. Hilangnya, atau setidaknya berkurangnya kesenjangan tersebut akan turut mengikis rasa kecewa dan kecemburuan sosial yang ada dan pada akhirnya akan mencegah terjadinya kekerasan langsung. Ketika orang asli Papua sudah merasakan kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya maka mereka akan menikmati kehidupan yang dimiliki. Mereka tidak akan melakukan kekerasan karena memang tidak ada motif yang mendorong tindakan tersebut. Dalam hal ini, program *food estate* menjadi salah satu aspek yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, baik orang asli Papua maupun pendatang. Seperti sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya *food estate* diharapkan akan menjadi pemicu dan sekaligus pendorong percepatan gerak roda perekonomian di Papua, khususnya di Merauke dan sekitarnya. *Food estate* akan membuat ketersediaan bahan pangan masyarakat Papua terjamin baik sehingga peristiwa kelaparan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Program ini juga akan membuka banyak lapangan kerja, baik *on farm* maupun *off farm*, di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Terbukanya lapangan kerja yang luas di tiga sektor tersebut juga akan memicu terbukanya lapangan kerja di sektor lain misalnya pendidikan, perumahan, perdagangan, dan kesehatan. Artinya akan terjadi efek domino berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat di wilayah Papua. masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, akan turut menikmati. Ketika kondisi ini telah tercipta maka kesenjangan ekonomi, sosial dan disharmoni budaya akan berkurang drastis, atau bahkan hilang, sehingga peristiwa kekerasan langsung akan dapat dicegah, konflik terselesaikan dan perdamaian akan terwujud.

## Eliminasi Kekerasan Struktural

Seperti disebutkan dalam bagian sebelumnya, bentuk kekerasan struktural yang dialami masyarakat Papua adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam teori kekerasan yang digagas oleh Galtung, ketidakadilan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan struktural karena penyebab terjadinya tidak dapat ditudingkan kepada satu pihak atau faktor tertentu saja. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, melibatkan banyak aktor dan faktor, baik langsung maupun tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, dan sengaja atau tidak sengaja. Aktor yang turut andil tersebut diantaranya Pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan unsur-unsur pemerintah yang lain) dan masyarakat (baik pendatang maupun masyarakat asli Papua). Adapun faktor yang terlibat antara lain adalah kebudayaan, adat istiadat dan kehidupan keagamaan yang ada di Papua.

Sampai saat ini upaya penyelesaian konflik di Papua lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan yaitu dengan menggunakan alat pertahanan keamanan negara, baik itu TNI maupun Polri, untuk melakukan penegakan hukum dan menghadapi KKSB. Akan tetapi harus diakui bahwa pendekatan tersebut belum cukup berhasil. Kondisi ini tidak mengherankan mengingat akar masalah konflik yang terjadi bersifat multidimensional. Dalam hal ini aspek ekonomi-sosial dan budaya belum tersentuh dengan baik melalui pendekatan keamanan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi konsep pemikiran Galtung penyelesaian konflik di Papua hendaknya dilakukan secara holistik, tetap menggunakan pendekatan keamanan namun juga mengikutsertakan pendekatan non-keamanan seperti melalui program *food estate* di Merauke. Penyertaan program non-keamanan ini diharapkan akan melengkapi pendekatan keamanan, terutama untuk memperbaiki ketimpangan kondisi ekonomi-sosial dan disharmoni budaya yang terjadi di kalangan masyarakat Papua guna mempercepat penyelesaian konflik di Papua.

Dalam hal ini berbagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya ketidakadilan tersebut harus terlibat aktif dalam program *food estate* ini sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki ketimpangan kondisi ekonomi-sosial dan disharmoni budaya yang terjadi di kalangan masyarakat Papua. Misalnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Papua harus mengawal dan memastikan bahwa implementasi pembangunan *food estate* di Merauke melibatkan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua. *Food estate* merupakan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan berskala besar yang membutuhkan modal besar, lahan luas dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat memiliki

keberpihakan lebih besar kepada masyarakat dari pada kepada pemilik modal atau investor. Bukan berarti regulasi yang dibuat bertujuan untuk membuat investor menanggung rugi demi menguntungkan masyarakat Papua. Dalam hal ini, di satu sisi, Pemerintah harus memastikan bahwa investor tetap harus untung namun dalam tingkat kewajaran. Di sisi lain, Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat Papua juga harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan bukan malah dieksploitasi serta dirugikan. Oleh karena itu harus dibuat skema yang saling menguntungkan semua pihak baik terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, keterlibatan masyarakat Papua (terutama orang asli Papua) dalam seluruh kegiatan *food estate*, hubungan antara investor dan pekerja, tingkat upah yang layak dan hal lainnya.

Masyarakat Papua, baik orang asli Papua maupun para pendatang, juga harus berpartisipasi dalam program *food estate* ini sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing agar berhasil. Kegiatan dalam usaha *food estate* sangat beragam karena meliputi beberapa sektor yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan serta terdiri dari kegiatan di hulu (*on farm*) sampai ke hilir (*off farm*). Masyarakat dapat terlibat di salah satu dari sektor dan atau kegiatan tersebut sesuai dengan minat dan keahliannya. Dalam hal ini, Pemerintah dan investor harus memastikan bahwa orang asli Papua ikut terlibat dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Mengingat secara umum kaum pendatang memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dari orang asli Papua maka harus ada program afirmasi sehingga orang asli Papua tidak terpinggirkan. Program afirmasi adalah kebijakan untuk memberikan dukungan kepada kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan agar mendapatkan akses yang sama terhadap suatu bidang tertentu. Dalam hal ini dukungan perlu diberikan kepada orang asli Papua agar dapat terlibat dalam program *food estate* baik sebagai investor atau tenaga kerja. Melalui program afirmasi tersebut orang asli Papua berhak untuk mendapatkan fasilitas khusus misalnya bantuan akses terhadap permodalan, kemudahan perijinan membuka usaha, penyediaan alokasi lahan khusus untuk investor orang asli Papua, penyediaan alokasi khusus jumlah pekerja yang harus diisi orang asli Papua, pemberian pelatihan ketrampilan secara gratis bagi orang asli Papua dalam bidang-bidang yang diperlukan program *food estate* dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat Papua secara keseluruhan harus bekerja bersama-sama dengan memanfaatkan berbagai aspek kehidupan terutama kebudayaan, adat istiadat dan agama yang ada di Papua untuk mendukung keberhasilan program *food estate* di Merauke. Melalui kegiatan dan forum-forum budaya, adat istiadat dan keagamaan para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kepala suku, pemuka agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar program *food estate* dapat diterima dan didukung masyarakat. Penerimaan

dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Papua terhadap program *food estate* merupakan salah satu elemen penting bagi keberhasilan program ini. Apabila skema tersebut berhasil diimplementasikan diyakini program *food estate* akan berangsur-angsur menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial serta disharmoni budaya di Papua. Ketika kondisi tersebut terwujud maka kekerasan struktural berupa ketidakadilan akan menghilang sehingga konflik akan semakin meredup dan akhirnya selesai.

## Simpulan

Kekerasan langsung dan kekerasan struktural merupakan dua manifestasi dari konflik di Papua yang telah berlangsung puluhan tahun sehingga perlu segera ditangani agar persoalan tersebut segera selesai. Dua tipologi kekerasan yang di adopsi dari teori Galtung tentang kekerasan tersebut ditengarai bersumber dari adanya kesenjangan ekonomi dan sosial serta disharmoni budaya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Pembangunan *food estate* di Merauke, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghasilkan komoditas ekspor, dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, terutama guna mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural tersebut.

Agar dapat mencapai hasil yang optimal, program pengembangan *food estate* ini dapat dilakukan dengan menggandeng program potensial lainnya di Papua secara terintegrasi, seperti sektor pariwisata, perikanan, kerajinan tangan dan berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya, untuk mempercepat proses membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang masih terisolasi. Hal ini perlu dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, tokoh adat / kepala suku maupun tokoh agama setempat yang merupakan pilar utama masyarakat Papua.

Dengan berjalannya konsep ini, diharapkan program pengembangan *food estate* di wilayah Merauke dapat menjadi *pilot project* untuk peningkatan ekonomi masyarakat Papua melalui konsep pertanian dan hal lain yang menjadi program pendampingnya. Pengembangan program *food estate* di Papua dapat menjadi salah satu alternatif solusi damai dalam mempercepat penyelesaian konflik yang menimbulkan berbagai peristiwa kekerasan, baik kekerasan langsung dan kekerasan struktural di wilayah tersebut. Program *food estate* ini juga merupakan salah satu upaya penyelesaian secara holistik, yaitu untuk melengkapi dan mendukung upaya penyelesaian dengan pendekatan keamanan yang telah berjalan selama ini.

## Referensi

- Anderson, B. (2015). *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. The East-West Center.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(2).
- Bertrand, J. (2014). Autonomy and Stability: the Perils of Implementation and “Divide-and-Rule” Tactics in Papua, Indonesia. *Nationalism and Ethnic Politics*, 20(2), 174–199.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies. In *Policy Studies* (Vol. 5). The East-West Center Washington.
- Druce, S. C. (2020). Political Impasse vs Economic Development: a History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia. In *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN* (pp. 89–116). Springer.
- Fernandes, C. (2006). *Reluctant Indonesians: Australia, Indonesia, and the Future of West Papua*. Scribe Publications Pty Limited.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. *Journal of Peace Research*, 8(2), 81–117.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
- Galtung, J. (2007). Peace by Peaceful Conflict Transformation—the Transcend Approach. In *Handbook of Peace and Conflict Studies* (pp. 14–32). Routledge.
- Galtung, J., & Höivik, T. (1971). Structural and Direct Violence: A Note on Operationalization. *Journal of Peace Research*, 8(1), 73–76.
- Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 6(1), 160–182.
- International Crisis Group. (2008). *Indonesia: Communal Tensions in Papua*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-communal-tensions-papua>
- Kirksey, S. E., & Bilsen, K. (2002). A Road to Freedom; MEE Articulations and the Trans-Papua Highway. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 158(4), 837–854.
- McGibbon, R. (2004a). Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict. In *Policy Studies*. East-West Center.
- McGibbon, R. (2004b). Secessionist Challenges in Aceh and Papua: is Special Autonomy the Solution? In *Policy Studies 10*. The East-West Center.
- Mollet, J. A. (2007). Educational Investment in Conflict Areas of Indonesia: the Case of West Papua Province. *International Education Journal*, 8(2), 155–166.
- Noviani, A. (2015). Ini Keinginan Jokowi soal Merauke Food Estate. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150525/99/437034/ini-keinginan-jokowi-soal-merauke-food-estate->
- Rajic, I. (2017). *Oligopoly, Regional Development and the Political Economy of Separatism, with a Case Study of the United Kingdom and Scotland*. University of Cambridge.
- Rizal, A., Junianto, J., Sahidin, A., & Zaida, Z. (2019). Risk Analysis of Trans Papua Corridor Road Infrastructure Development in West Papua and Papua Province of Indonesia. *World Scientific News*, 126, 261–275.
- Santosa, E. (2014). Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 1(2),

80–85.

- Sumule, A. (2004). *Protection and Empowerment of the Rights of Indigenous People of Papua (Irian Jaya) Over Natural Resources Under Special Autonomy: from Legal Opportunities to the Challenge of Implementation* (No. 36; Resource Management in Asia-Pacific Working Paper No.).
- Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18.
- Viartasiwi, N. (2018). The Politics of History in West Papua-Indonesia Conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159.
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.